

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J., & Pengantar, S. 1. (n.d.) (2012). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.
- Chazawi, A. (2013). *Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak & Moral Kesusilaan Yang Menjungjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa & Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Effendi, J. (n.d.). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*.
- Ernawati, S., dkk. (2024). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*-Damera Press. Damera Press.
- Husamuddin, M. Z., dkk. (2024). *Hukum acara pidana & pidana cyber: buku ajar*.
- Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2025). *Mendalami Kriminologi (Konsep, Teori, dan Aplikasi Dalam Penanganan Kejahatan)*. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.
- Kanter, E.Y; Sianturi, S.R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Ishaq H. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Efendi, Ed.). Rajawali Pres.
- Is, M. S., & S HI, (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Isnantiana, N. I. (n.d.). *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*.
- Jonaedi, E. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media: Depok.
- Jenderal, S., Kepaniteraan, D., & Konstitusi, M. (2010). *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*.

- Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Martosoewignyo, S. S., Ramdhan, M. I., & Indonesia. (2006). *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam batang tubuh UUD 1945 : sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945* (Ed. 2., cet. 1). Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mahfud, M. (2010). *Membangun politik hukum, menegakan konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahadian, D., Jalil, B., & Amalia, M. (2024). *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Soesilo, M. K. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*. Bogor: Politeia Bogor.
- Sutarni, N. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Sabila, Y., Bustamam, K., Badri, /, & Hi, S. (n.d.). *Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*.
- Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sadikin, D. H., Fahmudin, M., Daharis, A., Anggraeni, D. C., Adityarani, N. W., Widiyantini, N., ... & Gofur, A. (2024). *Pengantar ilmu hukum*. CV. Duta Sains Indonesia.
- Sri, O. :, & Wilujeng, R. (n.d.). *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*.

Tongat. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantera Persada Utama.

Yudisial, S. J. K., & INDONESIA, R. Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif.

Zainal Arifin Mochtar. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori Asas, dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Rajawali Pres.

Artikel Dalam Jurnal

Abidin, Z. (2023). Application of Administrative Sanctions in Decisions on State Administrative Cases at the State Administrative Court. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 221–227. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i4.38>

Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zuhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240-252.

Al Fiqriyah, A. S., & AlFiqriyah, A. S. (2023, August). Perlindungan Hukum Korban Kasus Pornografi Pina Aprilianti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor 150/pid/2020/pt bdg). In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 2, pp. 937-941).

Bryan Ursipuny, F., & Korespondensi, P. (n.d.). *NOMOKRASI SOFT TRIAS POLITICA: Menguji Relevansi Dampak Antar Lembaga Kekuasaan di Indonesia*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28464/27817>

Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202-209.

- Fikma, I., Rozi, F., & Kotabumi, U. M. (n.d.). penegakan hukum terhadap pelaku pengancaman pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara).
- Hidayat, A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pornografi Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia (analisis undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Harefa, F. M. S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menyebarkan Foto Pornografi DI Media Sosial.
- Karisma, P. T., & Anggellina, Y. P. (2023). Konflik antara Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Publik dalam Penegakan Hukum Pidana: Studi Kasus Kontemporer. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2297–2306. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3857>
- Leite, R. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Konten Oleh Kreator Video yang Menjurus Kepada Pornografi di Media Sosial. *Jurnal Kertha Negara Vol 11* , 423-433.
- Markuat. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Foto/Video Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Putusan Nomor : 902/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst). *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol 2*, 27-43.
- Munte, H., & Tua Sagala, C. S. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183–192. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- Palguna G. (n.d.). *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*.
- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. In *Jurnal Konstitusi: Vol. I* (Issue 1).
- Rishan, I. (2021). The Concept of Judicial Review of the Legislative Process in the Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 1–21. <https://doi.org/10.31078/jk1811>

- Rongkene, B. (2020). Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Lex Crimen*, 9(1).
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Indonesia. *Sosiohumaniora, Vol 18*, 131-137.
- Sinaga, E. (2014). Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 695-706.
- Subechi Imam. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, volume 1*(ISSN : 2303-3274), 340–358.
- Saputra, N. J. (n.d.). Penyimpanan Video Yang Mengandung Unsur Pornografi Untuk Kepentingan Pribadi Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Kertha Desa*, 10(2), 14–24.
- Uneto, N. P. (2018). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Lex Crimen*, 7(7).
- Wijaya, R. (2023). *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak-HAK Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Peraturan Perundang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Skripsi

Damanik, R. D. (2022). *pidanaan bagi pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi menggunakan akun anonim di media sosial (Analisis Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN. Bks)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah .

Firnandasari, I. O. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Model Yang Menjadi Objek Dalam Pembuatan Vidio Dengan Muatan Pornografi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 287/Pid.sus/2020/PT MDN)*. Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara.

Nurfauziah, N. (2022). *Rekonstruksi Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Surabaya: Universitas Narotama.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Pasal 8 UU No 44 Tahun 2008.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 287/Pid.sus/2020/PT MDN.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 150/PID.SUS/2020/PT Bandung.

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 289/Pid.B/2019/PN.Grt.

